

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN *PARIWISATA*
DI KABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS OBJEK *WISATA CANDI GEDONG SONGO*)**

M. Junaidi, Amni Zarkasyi Rahman

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Tourism development at Gedong Songo Temple requires the involvement of various stakeholders because the site holds interconnected historical, cultural, environmental, and economic values. This study aims to identify and analyze the relationships and roles of stakeholders in the development of Gedong Songo Temple as a tourism destination in Semarang Regency, and to analyze the factors that support and hinder stakeholder collaboration. This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, documentation, and literature review, involving seven key informants selected using snowball sampling. The data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analytical framework used the concept of stakeholder roles, including policy creators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators, as well as collaboration factors consisting of values, communication, trust, and policy. The findings show that the Department of Tourism, Museums, and Cultural Heritage of the Ministry of Culture, Perhutani, banking institutions, business actors, local community associations, and digital promotion media have distinct roles in destination development. Stakeholder relationships are formed through this division of roles. Collaboration is supported by preservation values, formal communication, institutional trust, and a clear policy framework. However, collaboration remains hindered by infrequent communication, the absence of agreement on extending the MoU, conflicting interests over revenue distribution, and the complexity of governance arising from the involvement of multiple authorities.

Keywords: Stakeholders, Collaboration, Tourism development, Gedong Songo Temple

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata di Candi Gedong Songo memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan karena kawasan ini memiliki nilai sejarah, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan serta peran pemangku kepentingan dalam pengembangan Candi Gedong Songo sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi pustaka dengan melibatkan tujuh informan kunci yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan konsep peran pemangku kepentingan, yaitu policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator, serta faktor kolaborasi yang meliputi nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, Perhutani, lembaga perbankan, pelaku usaha, kelompok masyarakat lokal, dan media promosi digital memiliki peran yang berbeda dalam pengembangan destinasi. Hubungan antar pemangku kepentingan terbentuk melalui pembagian peran tersebut. Kolaborasi didukung oleh nilai pelestarian, komunikasi formal, kepercayaan kelembagaan, dan kerangka kebijakan yang jelas. Namun, kolaborasi masih terhambat oleh komunikasi yang belum intensif, belum diperpanjangnya nota kesepahaman (MoU), serta kompleksitas tata kelola kawasan yang bersifat multitoritas.

Kata kunci: Stakeholder, kolaborasi, pengembangan pariwisata, Candi Gedong Songo

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sektor pariwisata juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui *multiplier effect*. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga berkontribusi sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi daerah (Hidayat, 2024).

Pada tahun 2023 sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 3,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada periode yang sama, nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai USD23,96 miliar yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional (Indonesia.go.id, 2025). Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai penghasil devisa, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara

berkelanjutan.

Pembangunan sektor pariwisata pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan maupun menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan destinasi wisata. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang beragam, baik wisata alam, budaya, sejarah, maupun religi. Potensi tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan berbagai destinasi wisata tersebut juga memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan

antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian sumber daya budaya dan lingkungan.

Salah satu kabupaten yang memiliki potensi tersebut adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki posisi strategis karena berada pada kawasan penghubung antardaerah di Provinsi Jawa Tengah serta didukung oleh keberagaman destinasi wisata yang terdiri atas wisata alam, budaya, sejarah, religi, dan wisata buatan. Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020–2025 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi, pemasaran, industri, serta kelembagaan pariwisata secara terpadu. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, Kabupaten Semarang terus mengembangkan berbagai destinasi wisata yang tersebar di seluruh wilayahnya. Keberagaman daya tarik

wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, dan wisata buatan yang menjadi potensi utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah melalui pengembangan destinasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan pada berbagai daya tarik wisata yang dikelola pemerintah daerah.

Data Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi selama periode 2018–2025. Pada masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan yang cukup signifikan sebagai akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan penutupan sementara

berbagai destinasi wisata. Namun demikian, setelah pandemi mereda, jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat hingga mencapai 4.511.945 kunjungan pada tahun 2025, yang didominasi oleh wisatawan nusantara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Semarang memiliki kemampuan untuk pulih (*tourism recovery*) dan kembali menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2026).

Tabel 1 Jumlah Capaian Kunjungan Wisata di Daya Tarik Wisata Kabupaten Semarang

Tahun	Pengunjung Domestik	Pengunjung Mancanegara	Jumlah Total Pengunjung
2018	3.372.791	8.999	3.381.790
2019	3.502.719	7.561	3.510.280
2020	3.755.628	1.029	3.756.657
2021	1.451.670	217	1.451.887
2022	3.774.942	1.029	3.775.971
2023	3.531.786	2.344	3.534.130
2024	3.986.208	2.306	3.988.514
2025	4.506.002	5.943	4.511.945

Sumber: Data Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (2026)

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki daya tarik wisata yang mampu menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Akan tetapi, capaian tersebut tidak terlepas dari keberadaan destinasi wisata unggulan yang menjadi magnet utama

kunjungan wisatawan. Salah satu destinasi yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Semarang adalah Objek Wisata Candi Gedong Songo. Kawasan wisata ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang menyimpan nilai sejarah tinggi, tetapi juga memiliki panorama alam pegunungan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Karakteristik tersebut menjadikan Candi Gedong Songo sebagai destinasi yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kawasan pelestarian cagar budaya sekaligus sebagai destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pengembangan destinasi wisata berbasis cagar budaya di Candi Gedong Songo menghadapi tantangan yang berbeda dengan destinasi wisata lainnya. Pengelolaan kawasan tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus menjaga kelestarian situs budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian cagar budaya. Konsekuensinya, proses pengembangan kawasan melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda, mulai dari pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, instansi pelestarian cagar budaya, pelaku usaha, masyarakat lokal, hingga pihak swasta yang memberikan dukungan

terhadap pengembangan fasilitas wisata. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Candi Gedong Songo tidak dapat dilakukan oleh satu aktor secara mandiri, melainkan membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan melalui pembagian peran yang jelas. Data kunjungan wisatawan memperlihatkan bahwa Candi Gedong Songo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, jumlah kunjungan wisatawan pada periode 2019–2025 mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan tercatat sebanyak 680.915 wisatawan, kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, jumlah kunjungan meningkat menjadi 426.361 wisatawan, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga tahun 2025. Meskipun demikian, dibandingkan dengan objek wisata lain yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Candi Gedong Songo tetap menjadi destinasi dengan jumlah kunjungan tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki posisi strategis dalam pembangunan sektor pariwisata Kabupaten

Semarang, sekaligus menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pengembangannya (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2026).

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Candi Gedong Songo Semarang Tahun 2019 – 2025

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2019	680.915
2	2020	321.071
3	2021	150.375
4	2022	426.361
5	2023	359.316
6	2024	312.776
7	2025	246.046
Jumlah		2.496.860

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (2026)

Penurunan jumlah kunjungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan pengelolaan destinasi. Berdasarkan observasi peneliti dan ulasan wisatawan pada Google Maps, masih ditemukan berbagai keluhan mengenai kondisi akses jalan, fasilitas pendukung, pengelolaan parkir, keamanan, dan kualitas pelayanan wisata. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada daya tarik wisata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta persaingan dengan objek wisata lainnya.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *stakeholder* memiliki peran penting dalam pengembangan destinasi wisata. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada identifikasi aktor atau bentuk kolaborasi secara umum. Penelitian mengenai pembagian peran *stakeholder* berdasarkan fungsi kelembagaan pada destinasi wisata yang memiliki karakteristik multitoritas, seperti Candi Gedong Songo yang melibatkan pemerintah daerah, Museum dan Cagar Budaya, Perum Perhutani, sektor swasta, masyarakat lokal, dan media digital masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, analisis mengenai peran masing-masing *stakeholder* menjadi penting untuk memahami bagaimana kolaborasi dibangun dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Objek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran *stakeholder* dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.

KAJIAN TEORI

a. Peran *Stakeholder*

Stakeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, pengaruh, maupun keterlibatan terhadap suatu kebijakan atau program. Dalam pengembangan pariwisata, *stakeholder* tidak hanya dipandang berdasarkan asal kelembagaannya, tetapi juga berdasarkan fungsi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian tujuan pengembangan destinasi. Oleh karena itu, setiap *stakeholder* dapat memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dan kapasitas yang dimiliki (Bryson, sebagaimana dikutip dalam Masyhurah et al., 2021).

Konsep peran *stakeholder* yang dikemukakan oleh Nugroho dalam (Yuniningsih et al., 2023) mengelompokkan peran *stakeholder* ke dalam lima, yaitu *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementor*, dan *accelerator*. Kelima peran tersebut digunakan untuk menganalisis pembagian peran masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang.

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan arah pengembangan, serta

menyusun regulasi sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan pariwisata.

2. *Coordinator*, yaitu *stakeholder* yang berfungsi mengoordinasikan, menyelaraskan, dan membangun sinergi antar *stakeholder* agar pelaksanaan program berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. *Facilitator*, yaitu *stakeholder* yang menyediakan dukungan berupa sarana, prasarana, pendanaan, maupun sumber daya lainnya untuk menunjang pelaksanaan pengembangan pariwisata.
4. *Implementor*, yaitu *stakeholder* yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program secara langsung sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.
5. *Accelerator*, yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat pencapaian tujuan pengembangan melalui dukungan, kemitraan, inovasi, maupun optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi Stakeholder

Keberhasilan kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun

menghambat pelaksanaan kerja sama. Menurut Destiana et al. (2020) terdapat empat faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi *stakeholder*, yaitu *value*, *communication*, *trust*, dan *policy*. Keempat faktor tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kondisi yang memengaruhi pelaksanaan kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Nilai (*Value*), yaitu kesamaan nilai, tujuan, dan komitmen antar *stakeholder* sebagai landasan dalam membangun kolaborasi.
2. Komunikasi (*Communication*), yaitu proses komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.
3. Kepercayaan (*Trust*), yaitu tingkat kepercayaan antar *stakeholder* yang dibangun melalui keterbukaan, komitmen, dan konsistensi dalam menjalankan peran masing-masing.
4. Kebijakan (*Policy*), yaitu kebijakan atau regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi serta pembagian

kewenangan antar *stakeholder*.

Keempat faktor tersebut digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Objek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang. Fokus penelitian meliputi analisis peran *stakeholder* berdasarkan dimensi *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementor*, dan *accelerator*, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi *stakeholder* yang terdiri atas *value*, *communication*, *trust*, dan *policy*.

Lokasi penelitian berada di Objek Wisata Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan melibatkan tujuh informan yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Perum Perhutani KPH Kedu Utara,

Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Analisis Hubungan Stakeholder dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo

Pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo melibatkan berbagai *stakeholder* yang terdiri atas Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, Perum Perhutani KPH Kedu Utara, Bank Mandiri, pelaku usaha, masyarakat sekitar kawasan wisata, dan media promosi digital. Masing-masing *stakeholder* memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaannya. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berperan dalam pengembangan destinasi wisata, Museum dan Cagar Budaya bertanggung jawab terhadap

pelestarian kawasan cagar budaya, sedangkan Perum Perhutani mengelola kawasan hutan yang menjadi bagian dari kawasan wisata. Sementara itu, pelaku usaha, masyarakat, lembaga perbankan, dan media promosi berperan dalam mendukung penyediaan layanan wisata, pengembangan fasilitas, promosi, serta pemberdayaan masyarakat.

Hubungan antar *stakeholder* dibangun melalui koordinasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga membentuk keterkaitan yang saling melengkapi dalam pengembangan kawasan wisata. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Candi Gedong Songo tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga mengintegrasikan aspek pelestarian cagar budaya, pengelolaan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal.

Analisis Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo

Berdasarkan konsep Nugroho (Yuniningsih et al., 2023) peran *stakeholder* dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo

dianalisis melalui lima dimensi, yaitu *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementor*, dan *accelerator*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* telah menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sehingga mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan wisata.

Sebagai *policy creator*, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, serta Perum Perhutani KPH Kedu Utara menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kawasan wisata sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan destinasi wisata dan pelestarian kawasan cagar budaya. Sebagai *coordinator*, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berperan mengoordinasikan pelaksanaan program dan membangun komunikasi dengan *stakeholder* lain agar kegiatan pengembangan kawasan berjalan secara terpadu.

Peran *facilitator* diwujudkan melalui penyediaan dukungan berupa sarana dan prasarana, pendanaan, serta fasilitas penunjang yang melibatkan

pemerintah daerah maupun pihak swasta. Selanjutnya, peran *implementor* dijalankan oleh seluruh *stakeholder* melalui pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari pengelolaan kawasan, pelestarian cagar budaya, pelayanan wisata, hingga pemberdayaan masyarakat. Adapun peran *accelerator* tercermin dari upaya mempercepat pengembangan kawasan melalui promosi, kerja sama, dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Candi Gedong Songo merupakan hasil kolaborasi berbagai aktor yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pengembangan kawasan wisata.

Pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu (nilai) *value*, (komunikasi) *communication*, (kepercayaan) *trust*, dan (kebijakan) *policy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *value* menjadi faktor pendukung karena seluruh *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kawasan wisata tanpa mengabaikan fungsi pelestarian Candi Gedong

Songo sebagai kawasan cagar budaya. Kesamaan tujuan tersebut menjadi landasan bagi setiap *stakeholder* untuk menjalankan peran sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga mendukung terciptanya kolaborasi dalam pengembangan kawasan wisata. Pada aspek komunikasi, koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* telah dilaksanakan melalui pertemuan maupun koordinasi dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, komunikasi belum berlangsung secara optimal sehingga masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

Aspek kepercayaan menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang telah terjalin antar *stakeholder* membentuk tingkat kepercayaan yang cukup baik dalam pelaksanaan pengembangan kawasan. Kepercayaan tersebut tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing serta komitmen untuk mendukung pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo. Namun demikian, pada aspek *policy* masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi, antara lain belum diperpanjangnya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara pihak-

pihak terkait, keterbatasan anggaran dalam pengembangan kawasan, serta adanya perbedaan kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah berjalan, penguatan aspek kebijakan, komunikasi, dan komitmen antar *stakeholder* masih diperlukan agar pelaksanaan kolaborasi dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo melibatkan berbagai *stakeholder*, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, Perum Perhutani KPH Kedu Utara, Bank Mandiri, pelaku usaha, masyarakat sekitar kawasan wisata, dan media promosi digital. Hubungan antar *stakeholder* terjalin melalui pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan destinasi wisata sekaligus menjaga kelestarian kawasan cagar budaya.

Berdasarkan analisis peran *stakeholder*, setiap *stakeholder* telah

menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, serta Perum Perhutani KPH Kedu Utara berperan sebagai *policy creator* dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga berperan sebagai *coordinator* dalam membangun koordinasi antar *stakeholder*. Peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan, sedangkan peran *implementor* dan *accelerator* tercermin dalam pelaksanaan program, pengelolaan kawasan, promosi, serta pengembangan kerja sama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan *stakeholder* pendukung lainnya.

Pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* dipengaruhi oleh aspek *value*, *communication*, *trust*, dan *policy*. Kesamaan tujuan dalam menjaga kelestarian kawasan dan mengembangkan pariwisata, komunikasi dan koordinasi antar lembaga, serta kepercayaan yang terbangun melalui kerja sama menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan kolaborasi. Namun demikian,

efektivitas kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti komunikasi yang belum optimal, belum diperpanjangnya Memorandum of Understanding (MoU), keterbatasan anggaran, dan perbedaan kepentingan antar *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, komitmen, dan dukungan kebijakan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo.

b. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan Objek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang, disusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *stakeholder* dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi dan pengembangan kawasan wisata, yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi kelembagaan dan kejelasan peran antarstakeholder.

Penguatan koordinasi perlu dilakukan melalui komunikasi yang berkelanjutan, pembaruan *Memorandum of Understanding* (MoU), serta penegasan pembagian

peran dan kewenangan antarstakeholder agar pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan wisata berjalan lebih efektif dan terpadu.

- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan destinasi berbasis pelayanan, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pengelolaan Objek Wisata Candi Gedong Songo perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana, pelestarian kawasan cagar budaya, penguatan promosi, serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Destiana, R., Yuningsih, T., & Kismartini. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 08. <https://doi.org/10.47828/Jianaasian.V8i2.18>.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. (2026). Data Kunjungan

- Wisata Kabupaten Semarang Tahun 2018–2025.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. (2026). Data Kunjungan Wisata Objek Wisata Candi Gedong Songo Tahun 2019–2025.
- Indonesia.go.id. (2025). Meneropong Tren Pariwisata 2025. <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Editorial/8899/Meneropong-Tren-Pariwisata-2025>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023.
- Masyhura, M., Yuniningsih, T., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 10(2), 578-597. <https://doi.org/10.14710/jppm.r.v10i2.49477>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020–2025.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2022). Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi.

